

**KERJASAMA INDONESIA DAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK (RRT)
MELALUI LOCAL CURRENCY SETTLEMENT (LCS)**

Oleh: Mario Rizki

mario.rizki3814@student.unri.ac.id

Pembimbing: Irwan Iskandar, S.IP., MA

Bibliografi: 9 Buku, 6 Jurnal, 6 Laporan, 32 Website

Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl, H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru, Pekanbaru Telp/Fax.
(0761) – 63277, 23430

ABSTRACT

Local Currency Settlement (LCS) is a cooperative scheme for the use of local currency in direct trade and investment transactions. The main goal is to reduce dependence on the US dollar and the adverse effects of that dependence. Indonesia first established LCS cooperation, namely with Malaysia and Thailand in 2016 and Japan in 2019. Indonesia continues to expand this LCS cooperation partnership, namely with the People's Republic of China (PRC) in 2020. It is important to see why Indonesia continues to expand its LCS partnership, namely with China which is Indonesia's newest partner. This study aims to analyse the purpose of Indonesia in establishing LCS cooperation with China.

In order to analyse the problem, the researcher uses the International Cooperation Theory, the LCS concept, and the level of analysis of the nation-state. The research method used by the research is descriptive qualitative and the data obtained are primary data obtained from documents from the official website of Bank Indonesia and the Ministry of Trade of the Republic of Indonesia and secondary data obtained from books, journals, and newspapers.

The results of this study indicate that the reason for Indonesia establishing SCS cooperation with China is because China is Indonesia's main trading partner and Indonesia wants to expand the use of the rupiah, reduce dependence on the US dollar, Indonesia wants to achieve the vision of the Blueprint Pengembangan Pasar Uang (BPPU) 2025 and to implement the National Economic Recovery (PEN) program in response to the COVID-19 pandemic.

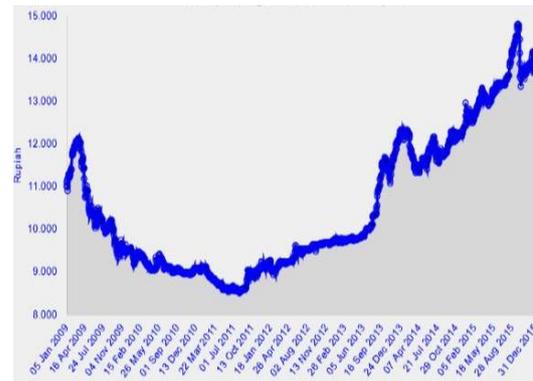
Keywords: Local Currency Settlement, US Dollar Domination, Bank Indonesia.

PENDAHULUAN

Transaksi perekonomian antarnegara dewasa ini tidak bisa lepas dari penggunaan berbagai jenis valuta asing sebagai media transaksi. Perekonomian suatu negara dapat dipengaruhi oleh pergerakan nilai mata uang asing, khususnya mata uang yang bernilai tinggi seperti dolar AS. Hal ini tidak terlepas dari sistem moneter internasional yang telah didominasi oleh dolar AS bahkan jauh sebelum sistem *Bretton Woods* terbentuk. Tonggak dominasi dolar ini diawali oleh kemenangan AS pada Perang Dunia ke-2. AS terlibat dalam pemulihan negara-negara yang terlibat perang dengan memberikan bantuan dalam bentuk dolar.

Fluktuasi nilai mata uang yang tidak menentu merupakan fenomena yang kerap terjadi. Dolar AS yang mendominasi ini dijadikan acuan untuk menilai kestabilan perdagangan. Dominasi dolar tersebut sangat dipicu oleh kondisi perekonomian AS yang dominan, tingginya tingkat *Gross Domestic Product* (GDP), serta kondisi politik yang stabil menjadikan dolar sebagai mata uang acuan dalam perekonomian global. Apabila kurs suatu mata uang terhadap dolar tidak stabil, maka cenderung akan mengganggu aktivitas perdagangan yang merujuk pada kerugian ekonomi negara tersebut. Selain fluktuasi, volatilitas mata uang juga menjadi ancaman bagi perekonomian negara-negara berkembang. Volatilitas dapat terjadi ketika terjadi sentimen negatif di pasar keuangan global, sehingga memicu keluarnya dana asing dari pasar keuangan negara-negara berkembang tersebut.

Nilai Tukar Dolar Amerika Serikat terhadap Rupiah Tahun 2009-2015



Sumber: Diolah penulis dari Bank Indonesia

Berdasarkan tersebut yang diolah dari Bank Indonesia (BI), nilai tukar rupiah terhadap dolar cukup fluktuatif. Nilai rupiah yang terdepresiasi terhadap dolar pada krisis finansial global tahun 2008, kembali terapresiasi sejak pertengahan tahun 2009 hingga tahun 2011. Permulaan tahun 2012 menjadi titik balik pelemahan rupiah hingga tahun 2015, dimana pada tanggal 29 September 2015 nilai rupiah mencapai Rp. 14.802 per US\$ 1. Secara keseluruhan dari periode tahun 2009 hingga 2015 nilai tukar mengalami pelemahan terhadap dolar. Kurs rupiah tersebut menjadi kurs yang paling rendah pada tahun itu setelah krisis moneter tahun 1998. Rupiah yang saat itu telah memberlakukan kebijakan sistem kurs mengambang bebas sejak 14 Agustus 1997 terus mengalami depresiasi hingga mencapai nilai terendahnya pada bulan Juni 1998 yaitu sebesar Rp.14.900,00 per dolar.¹

Upaya terbaru yang dilakukan Indonesia untuk mengurangi ketergantungan dolar AS dengan menggagas kerjasama *Local Currency Settlement* (LCS) bersama dengan dua negara mitranya yakni Malaysia dan Thailand. Ketiga negara tersebut juga ingin

¹ Tara Eka P. dan H. Purbayu Budi S., "Analisis Perilaku Kurs Rupiah (IDR) terhadap Dolar Amerika (USD) pada Sistem Kurs Mengambang Bebas di

Indonesia Periode 1997.3-2011.4 (Aplikasi Pendekatan Keynesian Sticky Price Model)," Diponegoro Journal of Economics Vol. 1, No. 1 (2012), hlm. 2.

ikut mengurangi penggunaan dolar AS dengan cara menggantinya dengan menggunakan mata uang lokal. Pada 23 Desember 2016, Bank Negara Malaysia dan Bank of Thailand menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) atau Nota Kesepahaman dengan Bank Indonesia dalam kerangka kerjasama untuk mempromosikan penyelesaian perdagangan bilateral dan investasi langsung dalam mata uang lokal mereka.² Nota kesepahaman ini ditandatangani oleh Gubernur Bank Indonesia Agus D.W. Martowardojo, Gubernur Bank Negara Malaysia (BNM) Muhammad bin Ibrahim, dan Gubernur Bank of Thailand (BOT) Veerathai Santiprabhob. Sebagai tindak lanjut dari nota kesepahaman yang ditandatangani pada 23 Desember 2016 tersebut, ketiga negara melalui bank sentralnya meluncurkan *Local Currency Settlement Framework* pada 11 Desember 2017 dan mulai mengimplementasikannya pada 2 Januari 2018.³ Pembentukan kerangka kerja ini menandai tonggak penting dalam memperkuat kerjasama keuangan daerah antara BI, BNM, dan BOT. Selain itu, BI dan *Japan Ministry of Finance* (JMOF) atau Kementerian Keuangan Jepang menandatangani nota kesepahaman pada 5 Desember 2019 di Tokyo. Kedua negara mulai mengimplementasikan kerjasama LCS pada 31 Agustus 2020.

Tidak berhenti sampai di situ, Indonesia terus melakukan perluasan kemitraan kerjasama LCS, dimana pada akhir September 2020 Indonesia dan Tiongkok menandatangani kesepakatan untuk kerjasama keuangan tersebut.

² Bank Indonesia, "Bilateral MoU on Local Currency Settlement Framework between Bank Indonesia, Bank Negara Malaysia and the Bank of Thailand," diakses dari https://www.bi.go.id/en/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_1810816.aspx pada Jumat, 10 September 2021 pukul 21.13 WIB.

³ Bank of Thailand, "Joint Press Release: Local Currency Settlement Framework Bank Indonesia, Bank Negara Malaysia and Bank of Thailand,"

Gubernur BI Perry Warjiyo dan Gubernur *People's Bank of China* (PBC) Yi Gang menyepakati kerangka kerjasama LCS dengan yang ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara kedua belah pihak. Dalam kurun waktu hampir satu tahun, kedua bank sentral menyusun semua persyaratan dan mekanisme operasional yang diperlukan dalam transaksi LCS. Sehingga kerjasama ini mampu direalisasikan secara resmi pada tanggal 6 September 2021.

KERANGKA TEORI

Perspektif: Liberalisme Interdependen

Penelitian ini menggunakan salah satu perspektif yang ada dalam hubungan internasional yaitu perspektif liberalisme, khususnya liberalisme interdependen.

Asumsi dasar dari varian liberalisme yang berfokus pada sektor-sektor ekonomi ini beranjak dari adanya keyakinan bahwa keadaan saling membutuhkan dan saling ketergantungan menjadi bagian alamiah dari manusia.⁴ Kini, liberalisme interdependen menjadi basis utama terbentuknya kerjasama-kerjasama ekonomi antarnegara baik kerjasama bilateral, multilateral, maupun regional karena mempertemukan kepentingan-kepentingan banyak aktor yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya.

Level Analisis: Negara-Bangsa

Level analisis yang penulis gunakan dalam tulisan ini adalah level analisis Negara-Bangsa. Menurut Mohtar Mas'ood level analisis negara-bangsa berarti semua

diakses dari [https://www.bot.or.th/Thai/AboutBOT/Activities/Documents/JointPress BI BNM BOT EN 11Dec2017.pdf](https://www.bot.or.th/Thai/AboutBOT/Activities/Documents/JointPress%20BI%20BNM%20BOT%20EN%2011Dec2017.pdf) pada Sabtu, 11 September 2021 pukul 10.44 WIB.

⁴ Vinsensio Dugis. 2016. *Teori Hubungan Internasional: Perspektif-Perspektif Klasik*. Surabaya: Cakra Studi Global Strategis (CSGS), hlm. 73.

pembuat keputusan, dimanapun berada, pada dasarnya berperilaku sama apabila menghadapi situasi yang sama.⁵ Tingkat analisis ini menekankan pada unit negara-bangsa dikarenakan perilaku dari unit ini sangat mendominasi dalam hubungan internasional. Tingkat analisis Negara-Bangsa dipilih karena yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah Indonesia selaku aktor negara yang melakukan kesepakatan kerjasama dengan Tiongkok dalam bidang keuangan.

Teori: Kerjasama International

Pada penelitian ini akan digunakan teori kerjasama internasional dari K.J Holsti. Dalam hubungan internasional, kerjasama internasional merupakan kebalikan dari konflik internasional. Menggunakan kacamata hubungan internasional, kerja sama internasional dapat dilihat dari sifat dan bidangnya. Lingkup aktivitas kerjasama internasional berdasarkan bidangnya yaitu seperti kerjasama bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya, pertahanan dan keamanan.⁶ Sedangkan jika dilihat dari sifatnya, kerjasama internasional terdiri dari kerjasama bilateral, trilateral, dan multilateral.

Fokus utama teori yang disampaikan Holsti ini adalah untuk mempelajari mengenai alasan-alasan yang menjadi determinan terjadinya suatu kerjasama antarnegara. Adapaun beberapa alasan yang disampaikan oleh Holsti yaitu sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi kepentingan nasional negaranya yang tidak dapat dipenuhi sendiri.
2. Untuk mengurangi kerugian yang ditimbulkan karena tindakan-

tindakan individu suatu negara yang berdampak terhadap negara lain.

3. Untuk meningkatkan efisiensi yang berkaitan dengan pengurangan biaya.
4. Untuk menghindari masalah-masalah yang mengancam keamanan bersama.⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

Alasan Indonesia Menjalin Kerjasama *Local Currency Settlement* (LCS) dengan Tiongkok

Secara mendasar, aspek-aspek yang melandasi Indonesia untuk memperluas kemitraan kerjasama LCS dapat diketahui berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/12/PBI/2020. Dalam peraturan tersebut terdapat tiga hal yang melatarbelakangi kerjasama LCS antara Indonesia dengan negara mitra lainnya, yaitu sebagai berikut:

1. Tingginya penggunaan dolar AS di pasar keuangan Indonesia tercermin dari dominannya penggunaan dolar AS tersebut dalam transaksi bilateral antara Indonesia dengan negara lain. Ketergantungan tersebut memiliki dampak terhadap meningkatnya kerentanan perekonomian Indonesia terhadap guncangan global.
2. Kerjasama ini juga dilakukan untuk mendorong penggunaan mata uang lokal yakni rupiah secara lebih luas untuk penyelesaian mata uang lokal antara Indonesia dengan dengan negara-negara mitranya.
3. Kerjasama LCS tersebut didasarkan pada hubungan perdagangan dan investasi antara Indonesia dengan negara mitra di bawah

⁵ Mohtar Mas'oed. 1990. Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi (Edisi Kedua). Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia, hlm. 41.

⁶ Perwita, Anak Agung Banyu dan Yanyan Mochamad Yani. 2005. *Pengantar Ilmu Hubungan*

Internasional. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, hlm. 33-34.

⁷ *Ibid*, hlm. 652-653

Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani oleh otoritas masing-masing negara. Sejauh ini, negara-negara mitra Indonesia dalam skema LCS ini yaitu diantaranya Thailand, Malaysia, dan Jepang termasuk dalam sepuluh besar mitra dagang utama Indonesia.⁸

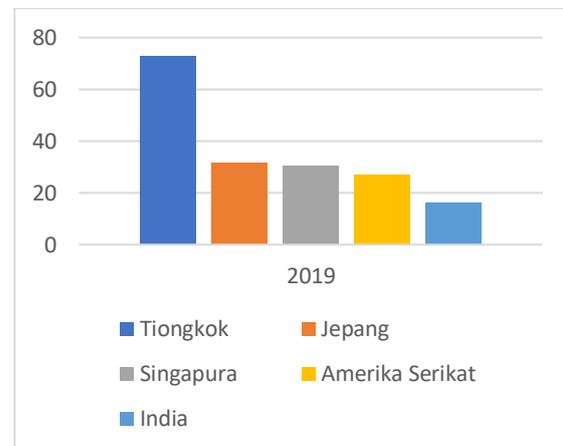
Alasan Indonesia menyepakati kerjasama LCS dengan Tiongkok akan dielaborasi melalui tiga aspek mendasar tersebut dengan mengkolaborasikannya dengan indikator-indikator dari Teori Kerjasama Internasional yang disampaikan oleh K.J. Holsti. Adapun indikator-indikator oleh Holsti terkait mengapa suatu negara menjalin kerjasama dengan negara lainnya yaitu diantaranya adalah 1) memenuhi kepentingan nasional yang tidak dapat dipenuhi, 2) menghindari masalah-masalah yang mengancam keamanan bersama, 3) mengurangi kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan-tindakan negara lain, dan 4) meningkatkan efisiensi yang berkaitan dengan pengurangan biaya.

1. Tiongkok merupakan Mitra Dagang dan Investasi Penting bagi Indonesia

Tidak dapat dipungkiri bahwa ekonomi menjadi salah satu alasan terkuat mengapa negara-negara menjalin kerjasama, terlebih ketika negara-negara tersebut telah memiliki kedekatan dan hubungan saling melengkapi dalam hal perekonomian. Berdasarkan poin nomor tiga dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/12/PBI/2020 yang telah dipaparkan sebelumnya, dinyatakan bahwasanya Indonesia menjalin kerjasama LCS dengan negara-negara mitra dagang dan investasi terbesarnya. Hal ini menjadi acuan dasar dan utama Indonesia terkait perluasan kemitraan skema LCS dengan Tiongkok yaitu karena Tiongkok merupakan mitra dagang terbesar bagi Indonesia baik dari sisi ekspor maupun impor dan juga sebagai

salah satu mitra investasi terbesar bagi Indonesia.

Total Perdagangan Indonesia dengan 5 Negara Mitra Terbesarnya Tahun 2019



Sumber: Databoks

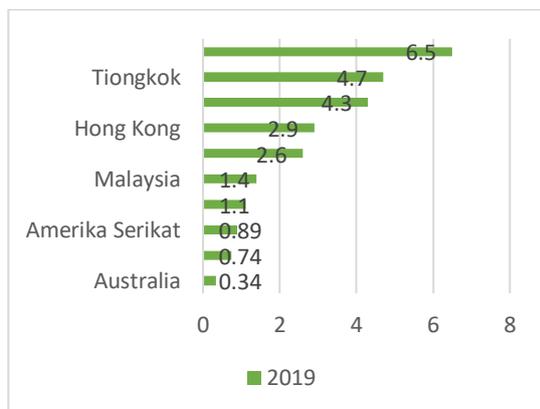
Seperti yang terlihat dari Grafik 4.1, Tiongkok menduduki peringkat pertama sebagai partner dagang utama Indonesia. Total perdagangan Indonesia dengan Tiongkok pada tahun 2019 mencapai US\$ 72,8 miliar. Namun, dengan total perdagangan yang besar dengan Tiongkok tersebut, Indonesia mengalami defisit neraca perdagangan sebesar US\$ 16,9 miliar dimana impor Indonesia mencapai US\$ 44,9 miliar sedangkan eksportnya hanya US\$ 27,9 miliar. Total perdagangan Indonesia dan Tiongkok tersebut mengalami peningkatan yang signifikan sejak tahun 2018. Dimana pada tahun 2017 total perdagangan kedua negara sebesar US\$ 58,8 miliar mengalami peningkatan menjadi US\$ 72,6 miliar. Meningkatnya total perdagangan selama dua tahun tersebut juga sedikit meningkatkan defisit neraca perdagangan Indonesia dengan Tiongkok, yaitu US\$ 12,6 miliar menjadi US\$ 18,4 miliar.

Alasan terkait Tiongkok sebagai mitra dagang utama ini juga didukung oleh Direktur Eksekutif Kepala Departemen Internasional BI yang menjabat selama periode tahun 2018 hingga awal tahun 2022

⁸ *Ibid*, hlm. 1-2.

yakni Doddy Zulverdi. Beliau menyatakan alasan utama Indonesia menjalin kerjasama LCS dengan Tiongkok ketika menjadi salah satu pembicara dalam webinar dengan judul “Dampak Penerapan LCS Diperluas, Bagaimana Nasib Rupiah?” yang diselenggarakan oleh Infobank sebagai salah satu media yang memberikan informasi seputar keuangan dan perbankan. Menurut Doddy Zulverdi, indikator utama yang digunakan oleh Indonesia untuk menjalin kemitraan LCS yaitu negara yang dipilih merupakan negara mitra utama Indonesia dalam perdagangan dan investasi, salah satunya Tiongkok.⁹ Sejauh ini telah terdapat empat negara yang menjadi mitra Indonesia, dan Tiongkok menjadi mitra keempat Indonesia dalam skema LCS yang juga dipilih berdasarkan fakta bahwa Tiongkok merupakan mitra perdagangan dan investasi yang penting bagi Indonesia.

Negara Investor terbesar di Indonesia Tahun 2019



Sumber: Databoks

Tiongkok yang merupakan salah satu mitra investasi terbesar bagi Indonesia juga menjadi salah satu pertimbangan dipilihnya negara tersebut oleh Indonesia untuk menjadi mitra LCS. Berdasarkan

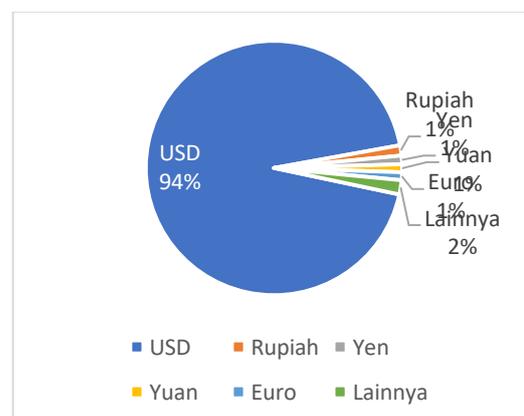
⁹ Infobanktv, “Webinar: Dampak Penerapan *Local Currency Settlement* Diperluas, Bagaimana Nasib Rupiah?” diakses dari https://www.youtube.com/watch?v=Y_6Dqm7vxAs pada Sabtu, 05 Maret 2022 pukul 09.22 WIB.

tersebut, Tiongkok menempati posisi kedua setelah Singapura yang berada pada posisi pertama sebagai negara asal investasi terbesar di Indonesia. Tercatat total investasi Tiongkok mencapai US\$ 4,7 miliar atau 16,8% dari total seluruh investasi yang masuk ke Indonesia pada tahun 2019.¹⁰ Dari total investasi tersebut, sebanyak 2.130 proyek yang dibangun Tiongkok di Indonesia. Jika dilihat dari tahun 2018, nilai investasi Tiongkok tersebut meningkat dua kali lipat yang sebelumnya hanya US\$ 2,4 miliar.

2. Keinginan Indonesia untuk Memperluas Penggunaan Rupiah

Keinginan Indonesia untuk memperluas penggunaan rupiah dalam transaksi perdagangan dan investasi juga menjadi landasan terjalannya kerjasama LCS dengan Tiongkok. Faktanya, penyelesaian transaksi perdagangan Indonesia dengan negara-negara mitranya masih dominan menggunakan dolar AS.

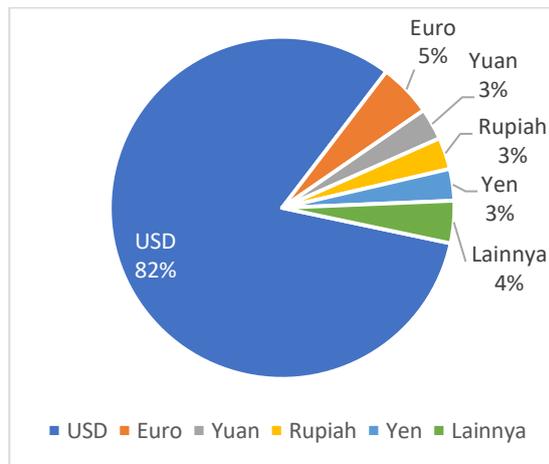
Penggunaan Mata Uang dalam Transaksi Ekspor Indonesia Tahun 2020



Sumber: *Center of Reform on Economics (CORE)* Indonesia

¹⁰ Databoks, “10 Negara Investor Terbesar Indonesia Sepanjang 2019,” diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/01/29/10-negara-investor-terbesar-indonesia-sepanjang-2019> pada Minggu, 06 Maret 2022 pukul 17.10 WIB.

Penggunaan Mata Uang dalam Transaksi Impor Indonesia Tahun 2020



Sumber: *Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia*

Bagi Indonesia, ketidakseimbangan penggunaan mata uang dalam transaksi perdagangan Indonesia dapat terlihat pada kedua grafik sebelumnya. Adapun Grafik terkait penggunaan mata uang dalam ekspor Indonesia selama tahun 2020 telah menunjukkan bagaimana dominasi dolar AS. Pada tahun 2020 total ekspor Indonesia sebesar US\$ 163,1 miliar baik dari ekspor migas maupun non-migas. Dari total ekspor selama tahun tersebut, penggunaan dolar AS sebagai mata uang pembayaran transaksi dalam ekspor Indonesia mencapai 94%.

Dari segi impor, dolar AS masih menjadi mata uang yang dominan dalam transaksi impor Indonesia. Pada tahun 2020, persentase penggunaan dolar AS dalam impor Indonesia mencapai 82% dengan total impor Indonesia sebesar US\$ 141,5 miliar, sehingga tetap menjadikan dolar AS sebagai mata uang dominan dalam transaksi impor Indonesia. Posisi kedua ditempati oleh euro dengan 5%, yuan 3%, rupiah 3%, yen 3%, dan mata uang lainnya sebesar 4%.

Dari total ekspor Indonesia yang mencapai US\$ 163,1 pada tahun 2020, ekspor Indonesia ke AS yaitu sebesar US\$ 18,6. Begitu juga dari segi impor, dimana total impor Indonesia yang mencapai US\$ 141,5, hanya US\$ 8,5 miliar yang Indonesia impor dari AS. Sedangkan penggunaan mata uang dolar AS sebagai alat pembayaran impor memiliki persentase sebesar 82%. Sedangkan persentase penggunaan rupiah juga masih jauh di bawah mata uang lainnya seperti euro dan yuan. Dengan dominannya penggunaan dolar AS tersebut mengindikasikan bahwa ketidakefesiensian dalam pembayaran masih begitu besar.

Sama halnya dalam investasi asing, nilai minimum yang diberlakukan pemerintah Indonesia kepada investor asing yang ingin melakukan investasi langsung di Indonesia yaitu sebesar Rp 10 miliar yang belum termasuk harga tanah dan bangunan.¹¹ Investor asing tersebut harus melakukan penyetoran minimal modalnya ke bank di Indonesia yaitu sebesar Rp 2,5 miliar. Tingginya nilai investasi Tiongkok di Indonesia sesuai dengan Grafik 4.2, tentu lebih banyak mengeluarkan biaya apabila penyelesaian transaksinya masih memerlukan dolar AS. Begitu pula investor-investor Indonesia yang melakukan investasi di Tiongkok, tentu akan mengeluarkan dana yang lebih ketika transaksi masih harus dikonversikan ke dolar terlebih dahulu sebelum dikuotasikan ke yuan.

Penggunaan mata uang rupiah dalam transaksi perdagangan dan investasi tersebut dapat dikategorikan sebagai kepentingan nasional Indonesia sehingga terus mengencarkan kerjasama LCS. Penggunaan mata uang lokal ini juga sesuai dengan poin nomor dua dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/12/PBI/2020 yaitu kerjasama LCS dilakukan untuk

¹¹ Kementerian Investasi Republik Indonesia, "Penanaman Modal Asing di Indonesia," diakses dari <https://www.investindonesia.go.id/id/artikel->

[investasi/detail/penanaman-modal-asing-di-indonesia](https://www.investindonesia.go.id/id/artikel-investasi/detail/penanaman-modal-asing-di-indonesia) pada Kamis, 10 Maret 2022 pukul 17.39 WIB.

memperluas penggunaan mata uang rupiah dalam transaksi perdagangan dan investasi dengan negara-negara lainnya. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, maka Indonesia perlu memperluas kerjasama LCS salah satunya yaitu dengan menyepakati kerjasama ini dengan Tiongkok.

3. Kepentingan Indonesia untuk Mengurangi Ketergantungan dan Dampak Buruk dari Dolar AS

Salah satu indikator dari Teori Kerjasama Internasional yang disampaikan oleh Holsti yaitu kerjasama internasional dilakukan untuk memenuhi kepentingan nasional suatu negara yang tidak dapat dipenuhi sendiri. Dalam upaya pencapaian kepentingan nasionalnya, suatu negara perlu untuk melakukan kerjasama dengan negara-negara lainnya.

Pengurangan penggunaan dolar AS dalam perekonomian Indonesia ini menjadi tujuan utama sekaligus kepentingan nasional yakni kepentingan ekonomi Indonesia dalam kerjasama LCS. Kepentingan ini sesuai dengan poin nomor satu dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/12/PBI/2020 yang menyebutkan bahwa Indonesia memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap dolar AS dalam pasar keuangan Indonesia dan hal ini menjadikan perekonomian Indonesia rentan akan krisis global.

Maka dari itu, pengurangan ketergantungan terhadap dolar AS sebagai kepentingan Indonesia dapat dijadikan acuan terkait alasan Indonesia menyepakati kerjasama LCS dengan Tiongkok. Tercapainya kerjasama LCS dengan Beijing yang menjadi partner keempat bagi Indonesia merupakan salah satu upaya yang dilakukan Jakarta untuk mencapai kepentingan nasionalnya tersebut. Dengan luasnya mitra kerjasama LCS, maka akan mendorong penggunaan mata uang lokal antara Indonesia dengan mitra-mitranya. Dimana hal tersebut akan berimplikasi pada ketergantungan akan dolar AS serta

meminimalisir dampak buruk yang dapat mengguncang perekonomian nasional.

4. Mencapai Visi dari *Blueprint Pengembangan Pasar Uang (BPPU) 2025*

Selain itu, adapun salah satu kepentingan Indonesia terus melakukan perluasan kemitraan kerjasama LCS yaitu untuk mempercepat pendalaman pasar keuangan, terutama dalam pasar valas. Dalam rangka memperdalam pasar uang sehingga mencapai pasar uang yang lebih maju dan modern, maka Bank Indonesia menerbitkan *Blueprint Pengembangan Pasar Uang (BPPU) 2025*.

Dalam kaitannya dengan pasar valas Indonesia yang dinilai masih dangkal dan kondisi pasar valas yang sering mengalami kelebihan permintaan (*net demand*) menjadikan pergerakan nilai tukar rupiah cenderung berfluktuasi dan rentan akan guncangan global yang menghasilkan volatilitas harga yang cukup tinggi. Melalui skema LCS ini pemerintah Indonesia berupaya untuk meminimalisir volatilitas dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Skema ini diharapkan mampu mengurangi ketergantungan pelaku pasar domestik atas penggunaan dolar AS dalam penyelesaian transaksi baik itu perdagangan maupun juga investasi.

Pencapaian tujuan pengembangan pasar valas Indonesia melalui LCS berarti bahwa Indonesia harus terus mengembangkan dan memperluas kemitraan kerjasama LCS itu sendiri. Pemilihan kerjasama dengan Tiongkok merupakan wujud nyata untuk mencapai tujuan pengembangan pasar valas itu sendiri. Dipilihnya Tiongkok sebagai mitra Indonesia selanjutnya sudah dipaparkan dalam BPPU 2025. Dalam BPPU 2025 tersebut dinyatakan bahwa:

Ke depan, kerja sama LCS tersebut akan terus diperluas dengan mitra dagang utama Indonesia lainnya di kawasan, seperti China, Korea, India atau negara mitra di kawasan

lainnya yang dapat mendukung kepentingan BI atau Indonesia.¹²

5. Upaya untuk Menjalankan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebagai Respon terhadap Pandemi COVID-19

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah menjadi pandemi yang mengerikan yang menjalar ke seluruh dunia dalam hitungan bulan. Pandemi ini tidak hanya berdampak pada kondisi sosial dan kesehatan masyarakat, tetapi juga mempengaruhi kondisi pendidikan dan perekonomian negara-negara, tak terkecuali Indonesia.

Menanggapi dampak tersebut, pemerintah mengeluarkan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang merupakan suatu upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam rangka mempercepat respon terhadap wabah COVID-19, dan menstabilkan sistem keuangan serta penyelamatan perekonomian nasional. Program PEN dikeluarkan dan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 tahun 2020. Program-program pemulihan ekonomi tersebut berguna untuk mendukung kebijakan keuangan negara dalam menangani pandemi COVID-19, menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian dan stabilitas keuangan nasional. LCS merupakan salah satu program pemerintah yang mendukung terlaksananya program PEN yang tertuang dalam Pasal 26 Ayat 1 yaitu sebagai berikut:

1. Dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, dapat dilaksanakan penyelesaian transaksi perdagangan

bilateral dengan menggunakan mata uang lokal (LCS)

2. Penyelesaian transaksi perdagangan bilateral dengan menggunakan mata uang lokal (LCS) merupakan penyelesaian transaksi perdagangan bilateral yang dilakukan oleh pelaku usaha di Indonesia dan di negara mitra dengan menggunakan mata uang negara masing-masing.
3. Dalam pelaksanaan transaksi perdagangan bilateral dengan menggunakan mata uang lokal (LCS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kementerian/lembaga dapat memberikan kemudahan, fasilitas, insentif, percepatan pelayanan ekspor-impor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai transaksi perdagangan bilateral dengan menggunakan mata uang lokal (LCS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.¹³

Pertumbuhan GDP Tahunan Indonesia dan Tiongkok Tahun 2015-20



Sumber: World Bank

Peraturan pemerintah yang ditetapkan pada 9 Mei 2020 ini mulai

Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional," diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/136615/pp-no-23-tahun-2020> pada Kamis, 24 Maret 2022 hlm. 16.

¹² *Ibid*, hlm. 50.

¹³ Pemerintah Pusat, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 19* (COVID-19) dan/atau

diundangkan dan diberlakukan sejak 11 Mei 2020. Peraturan ini menjadi salah satu alasan mengapa Indonesia menjalin kerjasama LCS dengan Tiongkok, dimana kesepakatannya terjadi pada September 2020 selama pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 ini telah memberikan dampak yang parah bagi perekonomian Indonesia dan Tiongkok. Seperti yang tertera dari Grafik 4.5 pertumbuhan *Gross Domestic Product* (GDP) mengalami kemerosotan pada tahun 2020. GDP merupakan salah satu statistik penting dalam perekonomian yang menjadi indikator utama dalam melihat kesejahteraan suatu negara. Tiongkok mengalami penurunan tingkat pertumbuhan GDP dari sebelumnya sebesar 5,95 pada tahun 2019 menjadi 2,348 pada tahun 2020. Sedangkan Indonesia dari pertumbuhan GDP sebesar 5,018 pada tahun 2019 mengalami pertumbuhan ke arah yang negatif selama tahun 2020 yaitu sebesar -2,07.

SIMPULAN

Terdapat beberapa alasan mengapa Indonesia terus mengembangkan dan memperluas kerjasama LCS dengan negara-negara lainnya, dalam hal ini dengan Tiongkok. Alasan-alasan tersebut memenuhi beberapa indikator yang disampaikan oleh K.J. Holsti yaitu 1) negara melakukan kerjasama untuk memenuhi kepentingan nasional yang tidak dapat dipenuhi sendiri, 2) menghindari masalah-masalah yang mengancam keamanan bersama, 3) mengurangi kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan-tindakan negara lain, dan 4) meningkatkan efisiensi yang berkaitan dengan pengurangan biaya.

Alasan utama Indonesia menjalin kerjasama LCS dengan Tiongkok yaitu karena Tiongkok merupakan partner dagang dan investasi penting bagi Indonesia. Alasan ini berkaitan dengan alasan kedua yaitu Indonesia ingin memperluas penggunaan mata uang rupiah.

Kedua alasan ini sejalan dengan dua indikator dari Teori Kerjasama Internasional yaitu untuk memenuhi kepentingan nasional dan meningkatkan efisiensi dan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/12/PBI/2020 poin nomor 2 dan 3.

Alasan ketiga yaitu Indonesia ingin mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS dan dampak buruk yang sering diakibatkannya. Alasan ini menjadi landasan utama bagi Indonesia sejak pertama kali membentuk kerjasama LCS ini. Alasan ini selaras dengan dua indikator dari K.J. Holsti yaitu terkait pemenuhan kepentingan nasional dan masalah yang mengancam keamanan.

Alasan keempat yaitu kerjasama dengan Tiongkok ini merupakan salah satu cara bagi Indonesia untuk mengembangkan pasar uang sesuai dengan *Blueprint Pengembangan Pasar Uang* (BPPU) 2025. Alasan kelima adalah sebagai upaya pendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang tertuang dalam PP Nomor 23 tahun 2020. Dimana kedua alasan ini juga dikategorikan sebagai kepentingan nasional Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ambarwati dan Subarno Wijatmadja. 2016. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Malang: Intrans Publishing.
- Dugis, Vinsensio. 2016. *Teori Hubungan Internasional: Perspektif-Perspektif Klasik*. Surabaya: Cakra Studi Global Strategis (CSGS).
- Eun, Cheol S., Bruce G. R., dan Sanjiv S. *Keuangan Internasional* (Edisi ke-6, Buku 1). Jakarta: Salemba Empat.
- Holsti, K. J. 1988. *Politik Internasional: Kerangka untuk Analisis*. (M. Tahrir Azhari, Terjemahan). Jakarta: Erlangga.

Jemadu, Aleksius. 2005. *Politik Global dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Graha Ilmu.

Mas'ood, Mohtar. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi (Edisi Ke-dua)*. Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia.

Perwita, Anak Agung Banyu dan Yanyan Mochamad Yani. 2005. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Dokumen

Bank Indonesia. "Blueprint Pengembangan Pasar Uang 2025 Bank Indonesia: Membangun Pasar Uang Modern dan Maju di Era Digital," diakses dari <https://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian/Documents/Blueprint-Pengembangan-Pasar-Uang-2025.pdf>

Bank Indonesia. "Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/11/PBI/2017 tentang Penyelesaian Transaksi Perdagangan Bilateral Menggunakan Mata Uang Lokal (*Local Currency Settlement*) Melalui Bank," diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/135775/peraturan-bi-no-1911pbi2017-tahun-2017> pada Jumat, 7 Januari 2022 pukul 11.11 WIB

Bank Indonesia, "Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/12/PBI/2020 pada Penyelesaian Transaksi Bilateral Menggunakan Mata Uang Lokal Melalui Bank," diakses dari https://www.bi.go.id/en/publikasi/peraturan/Documents/FAQ_PBI_22_1220.pdf pada Sabtu, 25 September 2021 pukul 22.40 WIB.

Bank of Thailand, "Joint Press Release: Local Currency Settlement Framework Bank Indonesia, Bank Negara Malaysia and Bank of

Thailand," diakses dari https://www.bot.or.th/Thai/AboutBOT/Activities/Documents/JointPress_BI_BNM_BOT_EN_11Dec2017.pdf pada Sabtu, 11 September 2021 pukul 10.44 WIB.

Pemerintah Pusat, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 19 (COVID-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional," diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/136615/pp-no-23-tahun-2020> pada Minggu, 13 Maret 2022.

Peraturan Kementerian Hukum dan HAM RI, "Transaksi Bank kepada Bank Indonesia dalam rangka *Bilateral Currency Swap Arrangement*," diakses dari <https://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2016/pbi18-7-2016bt.pdf> pada Kamis, 09 September 2021 pukul 08.44 WIB.

Jurnal

Eka P., Tara dan H. Purbayu Budi S. "Analisis Perilaku Kurs Rupiah (IDR) terhadap Dolar Amerika (USD) pada Sistem Kurs Mengambang Bebas di Indonesia Periode 1997.3-2011.4 (Aplikasi Pendekatan Keynesian Sticky Price Model)," *Diponegoro Journal of Economics* Vol. 1, No. 1 (2012): 1-13.

Hafsah Supadi, "The Use of Local Currency Settlement in Trade among Indonesia, Malaysia, and Thailand," *JOM FISIP* Vol.8, No. 2 (Juli-Desember 2021).

Nur Muta'ali, Hadi. "Kepentingan Indonesia Malaysia Thailand Terhadap Kerjasama *Local Currency Settlement Framework* (LCS)," *eJournal Ilmu Hubungan Internasional* Vol. 8, No. 1 (2020): 212-222.

Website

Bank Indonesia, "Blueprint Pengembangan Pasar Uang 2025 Bank Indonesia," diakses dari <https://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian/Documents/Blueprint-Pengembangan-Pasar-Uang-2025.pdf> pada Senin 21 Maret 2020, pukul 14.39 WIB, hlm. 25.

Bank Indonesia. "Bilateral MoU on Local Currency Settlement Framework between Bank Indonesia, Bank Negara Malaysia and the Bank of Thailand," diakses dari https://www.bi.go.id/en/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_1810816.aspx pada Jumat, 10 September 2021 pukul 21.13 WIB.

Bank Indonesia. "Indonesia-Tiongkok Memulai Implementasi Penyelesaian Transaksi Bilateral dengan Mata Uang Lokal (*Local Currency Settlement*)," diakses dari https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2322721.aspx

Bank Indonesia. "Kurs Transaksi Bank Indonesia," diakses dari <https://www.bi.go.id/id/statistik/informasi-kurs/transaksi-bi/Default.aspx> pada Rabu, 08 September 2021 pukul 20.22 WIB.

Bank Indonesia. "Pelaku Usaha dan Perbankan Sambut Baik Implementasi LCS Indonesia-Tiongkok," diakses dari https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2323221.aspx

[ang-media/news-release/Pages/sp_2323221.aspx](https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2323221.aspx)

Bank Mandiri. "*Local Currency Settlement*," diakses dari <https://www.bankmandiri.co.id/faq-local-currency-settlement1> pada Sabtu, 25 September 2021 pukul 23.19 WIB.

Infobanktv,"Webinar: Dampak Penerapan *Local Currency Settlement* Diperluas, Bagaimana Nasib Rupiah?" diakses dari https://www.youtube.com/watch?v=Y_6Dqm7vxAs pada Rabu, 23 Maret 2022 pukul 09.22 WIB.

Joint Press Release: Local Currency Settlement Framework Bank Indonesia, Bank Negara Malaysia, and Bank of Thailand," diakses dari https://www.bot.or.th/Thai/AboutBOT/Activities/Documents/JointPress_BI_BNM_BOT_EN_11Dec2017.pdf pada Rabu, 26 Februari 2022 pukul 13.21 WIB, hlm. 1-2.

The People's Bank of China, "PBC and BI Launch a Framework for Local Currency Settlement," diakses dari <http://www.pbc.gov.cn/en/3688110/3688172/4157443/4334700/index.html> pada Selasa, 01 Maret 2022 pukul 12.12 WIB.

The World Bank, "GDP (Current US\$)," diakses dari https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?end=2016&most_recent_value_desc=true&start=1960 pada Minggu, 26 Desember 2021 pukul 00.30 WIB.